

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Rp 600 Triliun untuk Ubah Jakarta

Palmerah, Warta Kota

Salah satu tantangan terberat yang akan dihadapi gubernur baru Jakarta adalah perubahan status dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Transformasi Jakarta menjadi daerah otonom, pusat ekonomi nasional, dan kota global yang diperkirakan membutuhkan biaya Rp 600 triliun!

Seperti diketahui, Jakarta akan mendapatkan pemimpin daerah yang baru setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar serentak, 27 November 2024. Dan, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta, entah itu petahana Anies Baswedan, atau Ridwan Kamil alias Kang Emil. Yang jelas, mereka akan menghadapi tantangan berat.

Maklum, setelah Keputusan Presiden (Kepres) yang mencabut status Jakarta terbit maka pusat pemerintahan Indonesia tidak lagi di Jakarta, melainkan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Status Jakarta menjadi DKJ akan menjadi pusat ekonomi dan kota global.

Menurut Saskia Sassen, profesor sosiologi di Columbia University (New York City, AS), kota global merupakan pusat perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama (key node) dalam sistem perekonomian global. Sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun daerah di sekitarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun mengakui kalau Jakarta akan mengalami transformasi besar setelah status Daerah Khusus Ibu Kota dicabut. Arah pembangunan akan beralih menjadi kota bisnis sekelas New York dan Melbourne. Jadi, Jakarta tidak hanya akan bersaing di ASEAN, melainkan juga secara global.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jakarta Joko



Agus Setyono mengungkapkan bahwa Jakarta membutuhkan dana Rp 600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global. Joko Agus menyampaikannya dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (9/7/2024).

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta sudah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kami untuk bisa setara dengan kota global lainnya di dunia. Itu membutuhkan anggaran Rp 600 triliun," sebut Joko Agus Setyono.

Joko menambahkan, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mencapai Rp 84 triliun pada tahun 2024. Jumlah tersebut sudah dibagi menjadi beberapa komponen, di antaranya belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

"Belanja modal akan kami upayakan untuk bisa ditingkatkan menjadi 19 persen yang seharusnya, menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, mestinya sampai 40 persen," terangnya.

Oleh karena itu, dari kebutuhan Rp 600 triliun hanya sekira 19 persen APBD yang diterima Pemprov DKI dan angka itu belum cukup menuju kota global. Joko mengaku, untuk mencapai kota global dengan anggaran minim maka Pemprov DKI bersinergi dengan DPRD DKI.

"(Kami) berupaya bagaimana melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor agar cita-cita menjadi kota global itu bisa terwujud," tukas Joko Agus Setyono.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta meminta rincian dari Pemprov DKI Jakarta ihwal kebutuhan Rp 600 triliun

untuk menjadi Kota Global. Pengawas pemerintah daerah itu menganggap, program harus dipaparkan secara mendetail dari dana sebanyak itu.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano mengaku, sudah mendengar pernyataan Joko Agus Setyono tersebut. Hingga kini Wibi belum mendapat rincian program dari dana yang diperlukan.

"Kami DPRD DKI Jakarta belum diberikan paparan lengkapnya Rp 600 triliun itu komponen apa saja. Saya rasa perlu segera dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta," tukas Wibi pada Rabu (10/7/2024).

Wibi melanjutkan, anggaran yang dibutuhkan dengan nilai APBD DKI Jakarta saat 2024 memiliki gap terlalu jauh. Total APBD DKI pada tahun ini di angka Rp 84 triliun, sedangkan kebutuhan penataan daerah menjadi Kota Global mencapai Rp 600 triliun. (faf)